



Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam

P-ISSN : 2621-0312

E-ISSN : 2657-1560

Vol. 6, No. 2 Tahun 2023

DOI : [10.21043/politea.v6i2.22937](https://doi.org/10.21043/politea.v6i2.22937)

Upaya Membangun *Public Trust* terhadap Partai Politik di Provinsi Berbasis Syariat Islam Aceh

Wais Alqarni

Universitas Syiah Kuala, Aceh, Indonesia

waisalqarni@usk.ac.id

M. Hasan Syamsudin

Institut Agama Islam Negeri Kudus, Jawa Tengah, Indonesia

hasan.syamsudin@iainkudus.ac.id

Rahmat Saleh

Universitas Syiah Kuala, Aceh, Indonesia

rahmat_saleh@usk.ac.id

Abstract

One of the public institutions that must provide services by referring to the principles of good governance is a political party. Political parties become part of the state due to state financing through the National Budget (APBN) and Regional Budget (APBD). The purpose of this study is to find out how public trust in local political parties, as well as to find out efforts in building public trust in local parties. The method used is qualitative with a descriptive approach. The result was that local parties must revamp party regeneration if public trust is to increase. In addition, party ideology must be clear so that it is easily understood by the public and also increases public trust in the political party itself. The conclusion from this research is that public trust in political parties is an important thing and one way to achieve this is for parties to be inclusive of the latest issues in their region or region. The next research recommendation that can be carried out is to explore how Islamic law is the basis of the political system in Aceh.

Keywords: Attempt, Public Trust, Political part, Islamic Sharia.

Abstrak

Salah satu lembaga publik yang harus memberikan pelayanan dengan mengacu pada prinsip-prinsip *good governance* adalah partai politik. Partai politik menjadi bagian dari negara karena pembiayaan negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap partai politik lokal, serta untuk mengetahui upaya dalam membangun kepercayaan publik terhadap partai lokal. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasilnya adalah partai-partai lokal harus mengubah regenerasi partai jika ingin kepercayaan publik meningkat. Selain itu, ideologi partai harus jelas agar mudah dipahami oleh masyarakat dan juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik itu sendiri. Kesimpulan dari penelitian ini ialah kepercayaan publik terhadap partai politik merupakan satu hal yang penting dan salah satu cara untuk meraihnya adalah dimana partai bisa inklusif terhadap isu-isu terbaru yang ada di wilayahnya atau di daerahnya. Rekomendasi penelitian yang bisa dilakukan berikutnya ialah menggali bagaimana syariat Islam menjadi basis sistem politik di Aceh.

Kata kunci: Upaya, Kepercayaan Public, Partai Politik, Syariat Islam.

Pendahuluan

Pelayanan Publik merupakan suatu keniscayaan yang mesti dilakukan oleh semua Lembaga pemerintah maupun non pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) (Muhammadiyah, 2013). Tuntutan dari penerapan *good governance* adalah agar terlaksananya pemerintahan yang dekat dengan rakyat, mengayomi, memudahkan setiap masyarakat dengan memberikan pelayanan prima. Pelayanan yang baik akan berdampak terhadap *public trust* (Nurhatika, 2023; Thoaha, 2017). Kepercayaan dari masyarakat tersebut dapat menjadi pendorong utama pemerintah maupun swasta dalam melakukan kerja-kerja pelayanan dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance*.

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* menjadi suatu hal yang sangat *urgent* dalam kaitannya melaksanakan pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan. Dengan dirancangnya konsep *good governance* ini agar setiap individu yang bekerja di sektor pemerintah maupun swasta memiliki *tools* untuk memberikan perubahan pelayanan kearah yang lebih professional, efektif, dan efisien, serta memberikan kemanfaatan lebih kepada setiap masyarakat yang mengakses pelayanan tersebut. Dikarenakan, masih adanya persepsi masyarakat yang melihat birokrasi belum professional,

adanya pungutan liar, serta lamban dalam memberikan pelayanan (Dayanandan, 2013; Rahmadana, 2020; Santosa, 2012; UNDP, 2011; Young et al., 2011).

Salah satu Lembaga public yang harus memberikan pelayanan dengan mengacu pada prinsip-prinsip good governance adalah Partai Politik. Partai politik menjadi bagian daripada negara disebabkan adanya pembiayaan negara melalui Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) (Surbakti, 2011). Oleh sebab itu, setiap Partai Politik, baik partai politik lokal maupun partai politik nasional sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik dinyatakan bahwa partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan penegluaran yang bersumber dari APBN maupun APBD (Nahuddin, 2015).

Kepercayaan publik dalam menjalankan suatu pemerintah merupakan salah satu alat pelengkap dalam menjalankan sistem pemerintahan. Kepercayaan tersebut harus didapatkan dengan cara yang dapat mendukung peningkatan kehidupan bermasyarakat. Kepercayaan publik yang tinggi dapat memberikan output yang besar terhadap sistem pemerintahan maupun non pemerintahan. Salah satunya kepada partai politik. Partai politik tersebut harus memiliki tata kelola organisasi yang baik seperti menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Penerapan tata kelola yang baik tersebut harus berdasarkan kebutuhan dan adanya rasa komitmen yang berasal dari pimpinan untuk mencapai keberhasilan (Azizah, 2020)

Implementasi penerapan *good governance* terhadap partai politik dapat diartikan sebagai penerapan sistem dan pelaksanaan kewenangan yang dapat mengurus urusan bangsa, serta masyarakat di non pemerintahan (Iskandar, 2017). Dalam penerapan *good party governance*, indikator penunjang keberhasilan penerapan tata kelola tersebut harus terdapatnya kepercayaan publik yang maksimal. Tentunya kepercayaan tersebut dapat terjadi secara meningkat dan juga menurun. Hal yang dapat memberikan penurunan terhadap kepercayaan publik terhadap organisasi maupun pemerintah dapat terjadi karena adanya kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung masyarakat dan tidak memiliki kualitas maupun kuantitas (Andhika, 2018).

Pada partai politik, perkembangan pengelolaan partai diatur dalam UU Republik Indonesia No.2 Tahun 2008 tentang partai politik, dan juga dibunyikan pada UU No.31 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa Partai politik perlu diperbarui sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat (Anggara, 2013). Pada peraturan tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan tata kelola partai politik dengan menerapkan *good party governance* harus terdapat fungsi dan tujuan yang mewujudkan cita-cita nasional, serta mengembangkan kehidupan dan kesejahteraan demokrasi pada masyarakat baik pada bidang sosial, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Tentunya dengan adanya hal tersebut, *public trust* akan terus meningkat dan dukungan terhadap partai tersebut akan tinggi.

Partai politik lokal di Aceh, diatur dalam PP Republik Indonesia No.20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik lokal di Aceh. partai politik lokal di Aceh ada karena terdapatnya momentum sejarah besar yang didalamnya memberikan hikmah terhadap perkembangan kehidupan masyarakat. Merujuk kepada UUPA No.11 Tahun 2006 tentang otonomi khusus kepada Aceh. momentum besar tersebut adalah terdapatnya konflik antara GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dan Pemerintah Republik Indonesia pada belasan tahun lalu. Kemudian ada akhirnya, tercadinya kesepakatan perdamaian antara Pemerintah RI dan GAM pada tanggal 15 Agustus 2005 yang berada di Helsinki, Finlandia. Dari hasil kesepakatan perdamaian tersebut, terdapat beberapa bidang yang dituangkan dalam UUPA (Undang-Undang Pemerintah Aceh) yaitu, Syariat Islam, Partai Lokal, pengelolaan minyak dan gas, dan lain-lain (Hardi, 1993; Helmi & Nurmandi, 2016).

Penelitian mengenai kontestasi politik di Aceh dari tahun 2006 sampai tahun 2019 terdapat beberapa suasana yang membuat turunnya kepercayaan public. Misalnya saja penelitian Raja Mawarzi yang mengkaji dinamika pemilu di Aceh yang terbit tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjalanan pemilu Aceh dari tahun 2006 sampai 2019 dipenuhi dengan intimidasi, kekerasan dan money politik yang terjadi hamper di setiap Kabupaten. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemilu belum tersentuh secara substansial dan hanya sebatas prosedural. Hal ini kemudian menguras public trust terhadap partai-partai lokal di Aceh. Kondisi semacam ini mengakibatkan partai-partai local yang awalnya mendapat banyak kursi kemudian menjadi merosot. Pada sektor legislatif tahun 2009,

Partai Aceh dan Partai Daulat Aceh mendapatkan 34 kursi dari 69 kursi legislatif. Pada tahun 2014 Partai lokal Aceh, Partai Aceh, Partai Nanggroe Aceh dan Partai Daulat Aceh mendapatkan 33 kursi dari 81 kursi legislatif. Pada tahun 2019 Partai Lokal Aceh yang terdiri dari Partai Aceh, Partai Nanggroe Aceh, Partai Daulat Aceh, dan Partai Sira mendapatkan 28 kursi dari 81 kursi legislatif. Pada hal ini menunjukkan bahwa partai lokal mengalami penurunan pada lolosnya kader kader terbaik mereka ke jalur legislatif. Maka dari itu perlu dilaksanakan penelitian dengan judul Membangun *Public Trust* Partai Politik Lokal Melalui Penerapan *Good Party Governance*.

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis (akademis), dan terhadap praktis (professional). Secara teoritis dan akademis penelitian akan dapat memberikan manfaat terhadap hasil penelitian yang diperlukan dalam mengembangkan pendidikan dan peningkatan ilmu pengetahuan pemerintahan maupun lembaga lainnya dalam menjalankan kebijakan dan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Hasil penelitian ini nantinya akan berupa laporan penelitian dan artikel bacaan hasil penelitian, sehingga dapat dipelajari dan sebagai rujukan dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian selanjutnya. Terkhusus terhadap kegiatan pendidikan dan pengembangan penelitian.

Secara praktis (professional), penelitian ini akan dapat memberikan manfaat terhadap partai lokal di untuk dapat membangun dan meningkatkan public trust terhadap partai lokal di Aceh, terlebih salah satu objek penelitian kami adalah partai lokal Aceh. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana *public trust* terhadap partai politik lokal,serta mengetahui upaya dalam membangun *public trust* terhadap partai lokal.

Kerangka Teori

Good Party Governance

Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu Good Party Governance merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan dalam mengelola sistem partai yang baik. Pengelolaan tersebut dijalankan dengan melihat seluruh aspek yang digunakan dalam penerepan Good Party Governance. Peran partai politik dalam sebuah negara demokrasi merupakan peran yang sangat besar. Peran tersebut tentunya dilaksanakan dengan pendekatan yang dapat memberikan efek samping yang positif terhadap negara. Pendekatan dan pengelolaan

tersebut harus dapat menghasilkan yang dapat menyetarakan antara *good governance* dan *good party governance*. Dalam mengelola pemerintah yang baik, harus memiliki terlebih dahulu pengelolaan sistem partai politik yang baik (Warjio, 2021).

Good Party Governance sudah menjadi salah satu isi yang banyak dibicarakan pada saat sekarang ini. Hal ini karena *good party governance* sudah menjadi dasar dalam pengelolaan dalam lembaga. Tetapi pada realitanya, pengelolaan sistem lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan pada saat sekarang ini masih dipenuhi dengan berbagai hal yang tidak mencerminkan *good governance*, seperti tidak transparan, dan kurangnya kualitas. Pada dasarnya, prinsip dasar pemerintahan yaitu memiliki konsistensi, rasa tanggung jawab, adanya akuntabilitas, terdapatnya kesetaraan serta partisipasi dalam mengelola lembaga, dan adanya keadilan yang dapat memastikan bahwa seluruh kepercayaan dan keputusan yang berasal dari publik harus terealisasikan.

Konsep *good party governance* diambil pada (Warjio, 2021) yang menyebutkan bahwa tata kelola partai politik yang baik yang dapat dikaitkan dengan penerapan indikator keberhasilan *Good Governance* dimana dalam pengelolaan partai politik harus dapat bersaing terhadap perkembangan demokrasi yang bersifat modern. Hal ini juga memiliki tujuan untuk meningkatkan rasa solidaritas partai yang dapat menjalani sistem pengelolaan partainya menjadi lebih baik. *Good party governance* juga memiliki fungsi sebagai advokasi, penerapan kaderisasi, dan pengenalan partai terhadap lembaga dan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas serta kuantitas suatu partai.

Terdapat 4 prinsip dalam menjalankan *Good Party Governance* menurut (Warjio, 2021). Yaitu penerapan efisiensi, dana yang ekonomis, efektifitas, serta bermartabat. Pada pernyataan diatas tersebut, diperkuatkan kembali bahwa dalam pengelolaan partai politik yang baik, harus mencakup beberapa indikator yang harus dilakukan. Disebutkan juga bahwa indikator dalam pengelolaan partai politik menggunakan analisis Warjio (2021) terdapat 5 indikator penerapan *Good Party Governance*, yaitu tata kelola keuangan partai, tata kelola komunikasi yang baik, tata kelola program yang baik, tata kelola konflik, tata kelola rekrutmen politik, tata kelola partai memerintah, dan tata kelola pemilu.

Dalam penerapan *public trust* terhadap partai politik, tentunya harus dapat menerapkan beberapa indikator diatas. Jika seluruh indikator tersebut telah dijalankan,

maka kepercayaan publik terhadap partai akan meningkat. Dalam partai politik lokal, kepercayaan publik merupakan sebuah kelengkapan dalam mengelola partainya. Sesuai dengan teori yang berasal dari Warijo (2021), maka indikator penerapan tersebut, dapat dikaitkan terhadap tata kelola partai politik lokal dalam mendapatkan public trust terhadap partai tersebut.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu teknik pengumpulan data, yang bertujuan untuk data yang bersifat relevan terhadap hasil penelitian. Adapun teknik penelitian yang dilakukan yaitu Observasi, merupakan cara dalam pengumpulan data dengan melihat dan mengamati suatu bidang atau objek pada penelitian (Tanzeh, 2009:61) Pada teknik observasi ini, peneliti melihat dan mengamati secara langsung bagaimana upaya partai lokal di Aceh dalam membangun *Public Trust* melalui *Good Party Governance* melalui turun langsung ke lapangan maupun melalui saluran berita dan jurnal yang tersedia. Selain itu peneliti melakukan teknik wawancara secara langsung atau bertatap muka dengan informan. Adapun beberapa informan yaitu anggota partai politik lokal, para kader, dan masyarakat. Terakhir teknik dokumentasi ini adalah teknik yang digunakan sebagai sumber melalui informan yang terkait dengan data, dokumen, maupun lainnya yang memiliki keterkaitan terhadap yang diteliti. Data tersebut diperoleh dari berbagai sumber baik secara pribadi, jurnal, buku, laporan, maupun dari kelembagaan (Sanusi, 2014:105) Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian dalam merangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data – data penelitian yang akurat. Dalam hal ini akan dilakukan pada partai politik lokal di Aceh terutama peserta Pemilu 2024 mendatang.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu jenis penelitian kualitatif. Pendekatan terhadap penelitian ini juga yaitu pendekatan terhadap studi kasus (*case study*). Dimana penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus (Nawawi, 2003:1). Selanjutnya, pendekatan studi kasus merupakan pendekatan yang berfokus pada lokasi atau satu bidang, kemudian terhadap kasus yang terjadi di waktu tertentu atau dapat juga berlanjut. Melalui jenis

penelitian kualitatif dengan adanya pendekatan studi kasus maka peneliti dapat mempelajari dan memberikan gambaran terhadap bagaimana membangun *Public Trust* terhadap partai politik lokal.

Hasil dan Pembahasan

Partai politik dimasa sekarang sangat mudah dan dikenal luas oleh masyarakat umum dimana setiap adanya pesta demokrasi pemilu atau pilkada partai politik yang menjadi kendaraan bagi masyarakat yang ingin meraihnya. Partai politik menaungi banyak kader dan memilih kader kader terbaik untuk mengikuti pemilihan baik di tingkat daerah hingga nasional dan juga di sisi legislatif maupun eksekutor. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) The Aceh Institute yang mengatakan bahwa:

Partai politik ini juga menjadi kendaraan seorang kader untuk mencapai tujuan menjadi legislator. Makanya saya selalu mengatakan bahwa hari ini yang sangat penting dalam menumbuhkan niat baik dan Good While nya itu dalam hal kepercayaan publik ada di partai politik. Orang apapun sebanyak apapun uangnya setinggi apapun elektabilitasnya, dia tidak akan bisa melakukan apapun jika tidak ada partai politik. Maka pr kita bersama adalah pada partai politik, tidak hanya di DPR atau di pejabat politik yang ada di eksekutif. Ketika menjadi narasumber dalam acara yang berkaitan dengan tema partai politik saya selalu mengatakan bahwa sekarang mahasiswa harus lebih kreatif dimana tidak hanya melakukan demonstrasi lembaga pemerintah, tetapi demo partai politik. Mengapa hal ini dilakukan, karena partai politik harus mewujudkan niat baik untuk mengirimkan calon calon atau kader kader yang berkualitas. (Wawancara, 28 April 2023)

Melihat kondisi nyata yang terjadi hari ini di daerah Aceh khususnya kader kader dari partai politik membuat kita “miris” dikarenakan banyak yang dipilih dan diusung oleh partai politik adalah orang orang yang tidak kredibel dan bukan orang yang berjuang dalam jangka waktu lama didalam partai tersebut sehingga kaderisasi dalam partai politik menjadi buruk. Hal ini terjadi dikarenakan kebutuhan “logistik” yang dibutuhkan oleh partai dalam mencapai tujuannya. Hal ini sudah diungkapkan oleh Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) The Aceh Institute yang mengatakan bahwa:

Namun pada hari ini bagaimana kondisi Aceh pada hari ini banyak orang orang yang tidak kredibel menjadi kader partai di Aceh ini sehingga kita tidak punya harapan yang besar untuk perubahan yang ada di Aceh, orang yang tidak kredibel

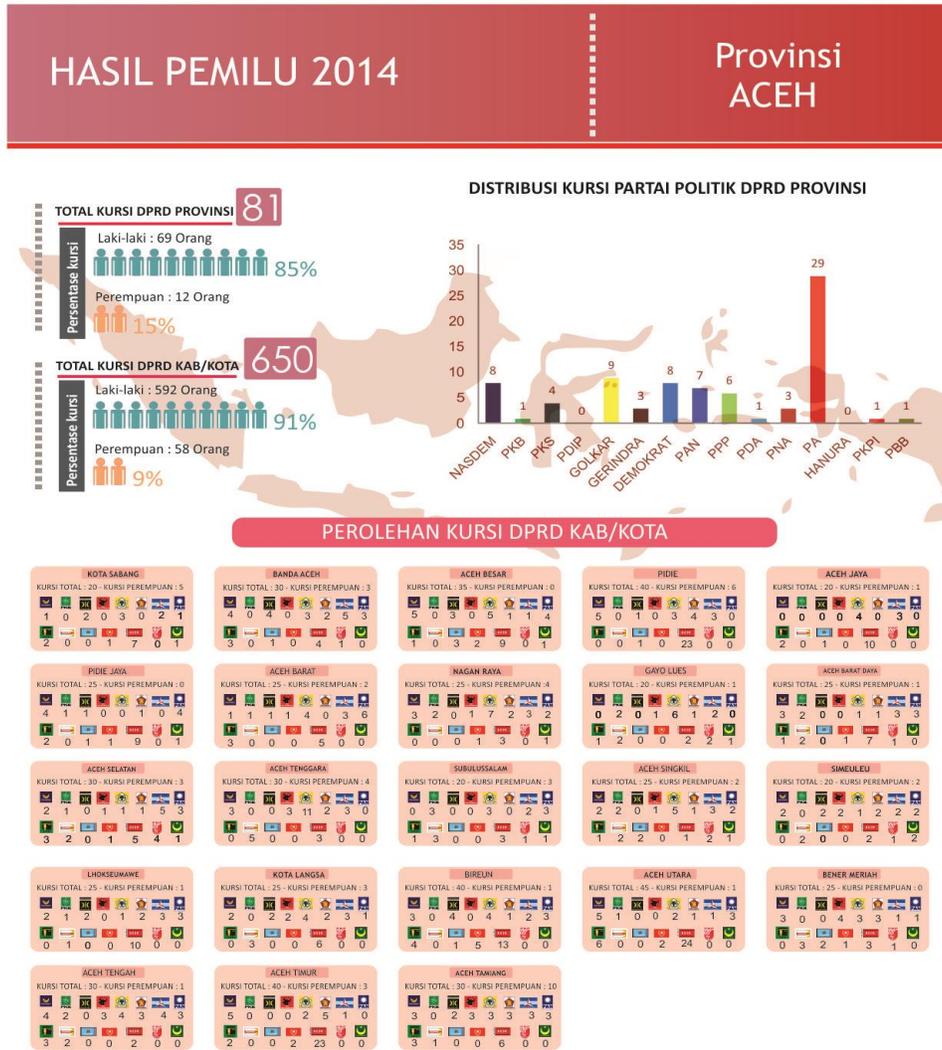
itu baik itu mafia tambang atau mafia lainnya. Mengapa kita meminta niat baik dari partai politik, karena mereka yang melakukan rekrutmen. Terkadang kita sayang melihat kondisi di partai, orang yang sudah lama di partai hingga partai itu semakin berkembang, dia tidak akan dicalonkan jika dia tidak memiliki logistik yang kuat. Hal ini berdampak partai politik akan mengambil orang-orang luar yang selama ini bukan kader partai hanya karena mempunyai logistik. (Wawancara, 28 April 2023)

Kebutuhan “logistik” di masa sekarang memang menjadi satu pertimbangan pada setiap partai politik baik di Aceh maupun di Indonesia dimana dapat kita lihat bahwa partai politik kondisinya hari ini adalah partai politik yang tidak mandiri. Hal ini terjadi karena “kemandirian” partai politik berada di tangan pengurus atau petinggi partai itu sendiri yang mana menyebabkan kesenjangan dan ketidakadilan terjadi secara internal partai politik. Secara umum harusnya kader-kader partai yang sudah berjuang lama yang mendapatkan tiket untuk berkompetisi pada pesta kontestasi demokrasi namun banyak rekrutmen kader-kader baru yang langsung diusung oleh partai politik dalam pemilu atau pilkada. Disebabkan oleh itu maka didalam partai politik sangat dibutuhkan kemandirian partai itu sendiri bukan kemandirian dari pengurus atau petinggi partai secara finansial pribadi. Berkaitan dengan pembahasan ini sudah dikonfirmasi oleh Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) The Aceh Institute yang mengungkapkan bahwa:

Makanya penting melihat kemandirian partai hari ini sehingga walaupun partai sudah mandiri secara finansial, ketika kadernya tidak mempunyai logistik yang kuat, maka partai akan mensupportnya. Menurut saya kondisi partai politik hari ini tidak mandiri, yang mandiri itu adalah justru pengurusnya. Ketika pengurusnya berganti maka akan partai juga akan mengalami krisis jika. Tapi kalau partainya yang mandiri, pergantian orang atau pengurus maka partai politik itu akan survive, itulah kondisi yang terjadi pada hari ini. Kader partai itu tidak hanya harus beragam tapi juga harus siap dengan kehilangan apapun tetapi kebijakan betul-betul untuk masyarakat. (Wawancara, 28 April 2023)

Berdasarkan wawancara dengan para informan yang telah ditentukan, dapat diketahui bahwa perjalanan partai politik mengalami pasang surut dan rintangan yang begitu hebat dimana peranan dari pengurus partai dalam manajemen sebuah partai sangat menentukan kemajuan dan perkembangan sebuah partai. Dapat kita lihat dalam dua pilkada Aceh tahun 2014 dan 2019. Pada tahun 2014 partai lokal mendapatkan suara untuk kursi

DPR Provinsi sebanyak 33 kursi dengan rincian 29 kursi dari Partai Aceh, 3 kursi dari Partai Nanggroe Aceh, dan 1 kursi dari Partai Darul Aceh.



Sumber: puskapol.ui.ac.id, 11 November 2014

Pada tahun 2019 juga telah terlaksananya pilkada di Provinsi Aceh. Pilkada pada tahun 2019 itu melibatkan pemilihan anggota DPR baik provinsi maupun kabupaten/kota. Berdasarkan data dari KIP Aceh untuk tahun 2019 pada pemilihan DPR provinsi Aceh, partai lokal mendapatkan jumlah kursi sebanyak 26 dengan rincian 18 kursi dari Partai Aceh, 1 Kursi dari Partai SIRA, 1 Kursi dari Partai Darul Aceh, dan 6 Kursi dari Partai

Kepercayaan publik terhadap partai politik merupakan satu hal yang penting dan salah satu cara untuk meraihnya adalah dimana partai bisa inklusif terhadap isu-isu terbaru yang ada di wilayahnya atau di daerahnya. Hal ini berdasarkan Wawancara dengan Ketua Komisi I DPR Aceh dari Fraksi Partai Aceh Periode 2019 – 2024:

Kita memang memahami perjalanan partai politik ini ada pasang surut. Pasang surut itu tergantung pada manajemen atau person yang mengelola partai. Kemudian partai bisa menangkap isu-isu kekinian yang itu sesuai dengan selera kepentingan konstituen, kepentingan publik di Aceh, jikalau tidak sesuai maka kita tidak bisa menjaga kepercayaan publik. (Wawancara, 28 Maret 2023)

Menurut Sekretaris Jenderal Partai Aceh H. Kamaruddin Abu Bakar atau yang lebih dikenal dengan Abu Razak pada penelitian yang lalu beliau mengatakan bahwa kunci dari elektabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap partai itu ada pada kader-kader partai tersebut. Terlebih lagi partai Aceh yang notabene nya adalah partai yang didominasi oleh para pejuang di Aceh haruslah mampu untuk meningkatkan elektabilitas dan kepercayaan publik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang mana beliau menyebutkan bahwa:

Berbicara masalah elektabilitas itu harus dari kader-kader partai tersebut. Sehingga ketika elektabilitas partai itu naik maka kepercayaan publik itu juga akan naik. Kader-kader partai itu harus berpihak kepada rakyat apalagi kita tidak hanya kepentingan kedepan tapi tanggung jawab perjuangan sebagai pejuang yang sekarang berjuang didalam partai politik. (Wawancara, 03 Juli 2022)

Ada beberapa pandangan lain berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap partai politik. Dalam pandangan tersebut mengungkapkan bahwasanya penilaian publik terhadap partai politik diawali pada kapasitas dari figur partai politik itu sendiri dimana masyarakat akan melihat bahwa apakah figur atau sosok person yang ada di dalam partai politik itu mempunyai kapasitas atau tidak berbobot atau tidak serta mampu atau tidaknya menampung aspirasi dari masyarakat itu sendiri. Selain itu tata kelola dan manajemen partai politik merupakan hal yang inti dalam meningkatkan kepercayaan publik pada partai politik dimana selarasnya program dan komunikasi yang terjadi secara internal partai. Jika ada partai yang mengalami kekacauan secara internal maka akan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap partai. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan dalam wawancara dengan Ketua Komisi V DPR Aceh dari Fraksi Partai Nanggroe Aceh Periode 2019 – 2024 bahwa:

Yang pertama penilaian publik ialah kapasitas seorang figur partai. Yang kedua trust terhadap figur partai itu bagaimana. Yang ketiga bagaimana tata kelola partai tersebut. anggota legislatif yang dikirim oleh partai tersebut apakah bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat. Anggota yang dikirim oleh partai pada lembaga legislatif maupun eksekutif ialah diusung oleh partai sebagai kendaraannya. Partai ini juga harus bisa bagaimana mengintervensi kebijakan kebijakan yang menguntungkan terhadap masyarakat. Kalau misalnya partai partai tersebut adalah partai yang mempunyai masalah atau partai yang sedang dalam kondisi kacau masyarakat tidak akan memilih, dalam hal ini partai harus bisa memaksimalkan manajemen dari kepartaian itu sendiri. Partai itu harus berfikir demokrasi, lebih objektif, dan kreatif serta mendorong kader kadernya yang ada di legislatif maupun eksekutif atau tidak, masyarakat akan percaya kepada partai baik lokal maupun nasional dan terutama lokal adalah selama partai tersebut mampu mengirim kader kader terbaiknya di legislatif dan eksekutif yang mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat. Tetapi kalau ada partai yang selalu bersitegang dengan internal partai maka masyarakat tidak akan memberikan kepercayaan nantinya apalagi berkaitan dengan kasus yang dilakukan oleh pengurus partai. (Wawancara, 13 Maret 2023)

Menurut beliau kondisi hari ini secara nyata dapat dilihat bahwa masyarakat sudah melihat perspektif baru dimana masyarakat sudah melihat figur atau sosok partai dimana figur atau personal seseorang menjadi lebih meyakinkan masyarakat dalam memilih. Sehingga partai politik hanya menjadi wadah atau kendaraan saja namun yang membuat masyarakat memilih adalah melihat perorangnya. Hal ini sudah disampaikan oleh dengan Ketua Komisi V DPR Aceh dari Fraksi Partai Nanggroe Aceh Periode 2019 – 2024 dalam wawancara yang mana beliau menegaskan bahwa:

Hal hal ini yang menjadi catatan bagi masyarakat sehingga hari ini masyarakat tidak lagi melihat sosok partai, tetapi sosok caleg maupun bupati maupun gubernur yang diusung oleh partai tersebut sehingga masyarakat yakin dan percaya kepada sosok yang diusung oleh partai tersebut. hal seperti ini menjadi antitesis bagi kita bahwa masyarakat semakin cerdas dalam menentukan pilihannya. Jadi bukan persoalan kendaraan tapi persoalan bagaimana ia mampu menjalankan amanah dari masyarakat. (Wawancara, 13 Maret 2023)

Partai politik dalam meningkatkan kepercayaan publik juga harus dapat menyelaraskan komunikasi antar anggota hingga pimpinan partai. Ketika kader kader partai mengikuti arahan dari pimpinan dan nasehat nasehat yang diberikan oleh pimpinan dijalankan oleh kader kader partai politik maka partai politik itu akan mendapatkan citra politik yang baik dan mencerminkan partai politik yang terbuka dan berkorban untuk

rakyat. Apalagi ketika kader kader partai terpilih dan sudah menduduki kursi parlemen atau kursi eksekutif dan mereka bekerja untuk rakyat dan kebijakan kebijakan serta program program yang dilaksanakan benar benar menyentuh kebutuhan rakyat, maka partai politik itu akan mendapatkan kepercayaan dan mendapatkan ruang tersendiri dialam kacamatan masyarakat. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Ketua Komisi VI DPR Aceh dari Fraksi Partai Aceh Periode 2019 – 2024 dalam wawancara beliau mengatakan bahwa:

Kami sesuai dengan arahan dari pimpinan partai politik yang penting ialah berbuat untuk masyarakat. Memang kami tidak dijelaskan secara detail bahwa harus melakukan seperti ini atau harus melakukan seperti itu untuk masyarakat, namun berbuatlah untuk masyarakat yang mana sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri bagaimanapun bentuk pelaksanaannya. Selain itu kader kader partai ini apalagi yang sudah terpilih dan sudah berada di lembaga pemerintahan jangan terlalu banyak tidur di kantor, perbanyak kegiatan dan turun kelapangan bertemu dengan masyarakat. Dan masyarakat tidak pernah meminta yang berat berat kepada partai. Jadi apa yang disampaikan oleh pimpinan partai menurut saya sangat efektif dan saya sendiri yang sudah mencalonkan DPRK dua periode dan sangat terlihat peningkatan suara itu terjadi dimana daripada periode pertama, periode kedua saya mendapatkan lebih banyak suara. Maka menurut saya apa yang disampaikan oleh pimpinan partai yaitu berbuat untuk masyarakat, masuk ke dalam masyarakat, duduk bersama masyarakat, jangan tegakkan bahu di depan masyarakat (Jangan Sombong dan angkuh), bersikap sederhana kepada masyarakat, ini sangat efektif dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai dan kader kadernya. Selain itu harus banyak menampung aspirasi dari masyarakat untuk kita perjuangkan baik itu dikabupaten maupun di provinsi. Jadi untuk kedepannya jika kader kader mendengarkan dan melaksanakan arahan yang baik dari pimpinan partai itu maka pastinya kepercayaan masyarakat akan meningkat dan kader partai akan banyak dipilih oleh masyarakat baik itu di legislatif maupun eksekutif. (Wawancara, 04 April 2023)

Walaupun demikian, kondisi politik hari ini sangat abstrak (tidak jelas) dimana pola masyarakat sebagian sudah berubah pada prinsip finansial. Pada kasus seperti ini menyebabkan banyak partai politik harus berfikir lebih matang dalam menentukan arah dan pandangan. Ketika partai politik sudah mewedahi aspirasi, membangun untuk negeri, membantu masyarakat secara nyata hingga memperjuangkan aspirasi namun ada sebagian masyarakat yang apatis dan hanya mementingkan materil. Hal ini tentunya sangat disayangkan terjadi di daerah Aceh khususnya. Namun dimasa sekarang masih ada juga para kader kader partai politik misalnya partai politik lokal di Aceh yaitu Partai Aceh salah satu kadernya menduduki kekuasaan legislatif daerah kabupaten selama dua periode

berturut turut tanpa melakukan serangan fajar dan *money politics* sepeserpun. Dikarenakan beliau memiliki keyakinan akan arahan dari pimpinan partai dimana jika itu dilakukan dengan sepenuh hati untuk rakyat maka rakyat dengan sendirinya akan memilih orang tersebut. Berkaitan dengan ini sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan pada Ketua Komisi VI DPR Aceh dari Fraksi Partai Aceh Periode 2019 – 2024 yang mana beliau mengatakan bahwa:

Selain itu, walaupun partai kami yaitu Partai Aceh banyak berbuat untuk masyarakat mulai dari membangun rumah untuk kaum duafa, membangun jalan, memberi bantuan untuk masyarakat, namun masyarakat hari ini sudah banyak yang menginginkan uang, memang tidak semua tapi kita lihat hari ini money politic tidak dapat dihindari pada hari ini. Saya sekarang menjadi anggota DPRA atau DPR Provinsi Aceh dimana saya jujur mengatakan saya sepeser pun tidak saya beri uang kepada masyarakat untuk memilih saya apalagi serangan fajar saya tidak melakukan itu. Yang saya lakukan adalah mengabdikan kepada masyarakat. Makanya saya bisa pagi di kantor namun siang hari sudah di dapil saya untuk duduk bersama dengan masyarakat. Selain itu saya juga telah merealisasikan kepada masyarakat apa apa saja janji janji saya kepada masyarakat, kepada panitia panitia pemenangan dan timses sehingga hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik. karena prinsip kenikmatan bagi saya adalah membantu masyarakat misalnya masyarakat yang sedang sakit bisa saya bantu, ketika masyarakat ada yang sakit bisa saya bawa ke rumah sakit provinsi dan mendapatkan pelayanan yang baik. (Wawancara, 04 April 2023)

Menurut akademisi dari Sekolah Tinggi Iskandar Thani mengungkapkan bahwa jika partai politik ingin meningkatkan kepercayaan publik itu dimulai dari kejelasan ideologi partai politik tersebut. Ketika ideologi partai tersebut dapat dipahami maka akan sudah diterima oleh masyarakat dan pastinya akan mendapatkan dukungan dari masyarakat itu sendiri secara otomatis. Selain itu kaderisasi haruslah sesuai sehingga partai itu dapat dilihat tokoh tokoh nya yang menjadi unggulan untuk dapat dipilih dikemudian hari oleh masyarakat. Hal ini di konfirmasi oleh beliau yang mengatakan bahwa:

Ketika partai politik ingin mendapatkan kepercayaan publik maka yang harus dilakukan adalah memperjelas ideologi kepartaian itu sendiri dimana ketika ideologi partai itu sudah jelas maka visi dan misi dari partai itu jelas yang mana dari hal ini membuat banyak masyarakat tertarik bukan hanya untuk bergabung ke partai tersebut tetapi juga mendukung kader kader dari partai politik tersebut untuk bertarung ke pesta pemilihan baik itu pemilu atau pilkada. Selanjutnya adalah

kaderisasi partai yang baik dan terstruktur, jika hal ini dilakukan pastinya kepercayaan publik terhadap partai politik bisa didapatkan (Wawancara, 22 Agustus 2023)

Pada penelitian yang telah dilakukan diwaktu yang lalu berkesempatan untuk mewawancarai Ketua Partai PDI-P Provinsi Aceh. Beliau mengatakan bahwa ideologi menjadi hal yang penting. Namun disatu sisi jika dilihat di Provinsi Aceh, mengapa Aceh sendiri sangat rendah mendapatkan dukungan dari rakyat adalah salah satunya berasal dari ideologi partai dan tokoh partai. PDI-P sendiri dipimpin oleh mantan Presiden Republik Indonesia dimana beliau pernah membuat satu kebijakan yang membekas di hati rakyat Aceh dan sulit untuk dilupakan. Hal ini menyebabkan beberapa partai yang berideologi tidak sesuai dengan Aceh yang notabene nya Syariat Islam pastinya tidak akan maksimal mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Aceh sebagai daerah yang memegang teguh ajaran dan aturan syariat pasti akan terus menjunjung tinggi nilai nilai islam. Berdasarkan wawancara dengan pimpinan partai nasional yaitu PSI pada penelitian yang pernah dilakukan ditemukan bahwa ketika Grace Natalie mengatakan bahwa mereka menolak aturan syariat islam, PSI di Aceh 2 bulan lamanya tidak bisa bekerja karena berpengaruhnya di tengah tengah masyarakat atas statement yang diucapkan oleh kader dari PSI tersebut. sehingga kader itu mempengaruhi sekali kepercayaan masyarakat terhadap partai politik.

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan maka dapat melihat dari sisi Good Party Governance nya yaitu dalam empat indikator yaitu efisiensi, dana yang ekonomis, efektifitas, serta bermartabat. Dapat dilihat dari sisi efisiensi partai politik sendiri masih belum maksimal dalam aspek efisiensi sendiri dimana masih banyak penganggaran yang tidak mandiri sehingga membutuhkan bantuan dari pihak luar dari partai politik. Ketika aspek efisiensi ini dapat dijalankan dengan baik maka partai politik itu akan mandiri dan akan mudah dalam menentukan visi misi yang sesuai dengan ideologi yang akan direalisasi oleh kader kader dari partai politik itu sendiri.

Dari aspek dana yang ekonomis pula masih terdapat hal hal yang belum maksimal dimana jika kemandirian partai itu tidak dapat dicapai, maka penganggaran akan menjadi permasalahan. Dari sisi aspek efektivitas sendiri, partai politik masih belum maksimal

dimana salah satu contohnya masih banyak kader-kader yang tidak “dilatih” dengan baik sehingga luaran yang diberikan baik pada masyarakat maupun internal partai sendiri masih belum maksimal. Dalam aspek bermartabat sendiri juga masih belum maksimal dimana masih banyak ditemukan kader-kader yang bermasalah sehingga berpengaruh pada partai politik itu sendiri.

Dalam meningkatkan kepercayaan publik pada partai politik pada sisi Good Party Governance maka ketika indikator efisiensi dilaksanakan maka akan berpengaruh pada maksimalnya dana yang ekonomis. Ketika aspek efektivitas dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka akan berpengaruh pada tingginya martabat dari partai itu sendiri. Maka perlu dijalankan indikator tersebut secara maksimal dan berkelanjutan agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada partai politik tersebut.

Kesimpulan

Partai politik menaungi banyak kader dan memilih kader-kader terbaik untuk mengikuti pemilihan baik di tingkat daerah hingga nasional dan juga di sisi legislatif maupun eksekutor. Perjalanan partai politik mengalami pasang surut dan rintangan yang begitu hebat dimana peranan dari pengurus partai dalam manajerial sebuah partai sangat menentukan kemajuan dan perkembangan sebuah partai. Kepercayaan publik terhadap partai politik merupakan satu hal yang penting dan salah satu cara untuk meraihnya adalah dimana partai bisa inklusif terhadap isu-isu terbaru yang ada di wilayahnya atau di daerahnya. Salah satu poin dimana masyarakat bisa mempercayai sebuah partai adalah dimana partai tersebut bisa memperjuangkan dan menjaga serta melaksanakan muatan lokal dan kearifan lokal dimana hal ini dalam konteks daerah Aceh. Penilaian publik terhadap partai politik diawali pada kapasitas dari figur partai politik itu sendiri dimana masyarakat akan melihat bahwa apakah figur atau sosok person yang ada di dalam partai politik itu mempunyai kapasitas atau tidak berbobot atau tidak serta mampu atau tidaknya menampung aspirasi dari masyarakat itu sendiri. Partai politik dalam meningkatkan kepercayaan publik juga harus dapat menyelaraskan komunikasi antar anggota hingga pimpinan partai. Ketika kader-kader partai mengikuti arahan dari pimpinan dan nasehat-nasehat yang diberikan oleh pimpinan dijalankan oleh kader-kader partai politik maka

partai politik itu akan mendapatkan citra politik yang baik dan mencerminkan partai politik yang terbuka dan berkorban untuk rakyat.

Referensi

- Andhika, L. R. (2018). Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah Melalui Redesain Proses Kebijakan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 3(1). <https://doi.org/10.24905/jip.v3i1.831>
- Anggara, S. (2013). Sistem Politik Indonesia. In B. A. Saebani (Ed.), *Pustaka Setia* (Cet. 1). Pustaka Setia.
- Azizah, W. I. (2020). Political Will Pemerintah Kabupaten Jombang terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Masyarakat Desa. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Politik*, 1(1), 50–62.
- Dayanandan, R. (2013). Good governance practice for better performance of community organizations - myths and realities !! *Journal of Power, Politics & Governance*, 1(1), 10–26.
- Hardi. (1993). *Daerah Istimewa Aceh, Latar Belakang Politik dan Masa Depan*. Cita Panca Serangkai.
- Helmi, H., & Nurmandi, A. (2016). Dinamika Kelembagaan Dalam Pelekasana Otonomi Khusus Syariat Islam Di Aceh (Kajian Kelembagaan). *Journal of Governance and Public Policy*, 3(2), 263–281. <https://doi.org/10.18196/jgpp.2016.0059>
- Iskandar, D. J. (2017). PENTINGNYA PARTISIPASI DAN PERANAN KELEMBAGAAN POLITIK DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 14(1), 17–35. <https://doi.org/10.31113/jia.v14i1.2>
- Muhammadiyah. (2013). Partisipasi Publik Sebagai Strategi Mewujudkan Good Governance Otonomi Daerah. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 57–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/ojip.v3i1.61>
- Nahuddin, Y. E. (2015). Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Menuju Tata Kelola Partai Politik yang Baik. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 6(2), 276–292. <https://doi.org/https://doi.org/10.26905/idjch.v6i2.1462>

- Nawawi, H. (2003). *Metode Penelitian Bidang Sosial* (1st ed.). Gajah Mada University Press.
- Nurhatika. (2023). Dampak Tata Pemerintahan yang Baik terhadap Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 5(4), 1528–1543. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jea.v5i4.1082>
- Rahmadana, M. F. (2020). Pelayanan Publik. In J. Simarmata (Ed.), *Yayasan Kita Menulis* (Cetakan 1). Yayasan Kita Menulis.
- Santosa, P. (2012). *Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi Good Governance*. Refika Aditama.
- Sanusi, A. (2014). Metodologi Penelitian Bisnis. In *Salemba Empat*. Salemba Empat.
- Surbakti, R. (2011). Pengendalian Keuangan Partai politik. In S. Pramono (Ed.), *Kemitraan Partnership* (Cetakan Pe). Kemitraan Partnership.
- Tanzeh, A. (2009). Pengantar Metode Penelitian. In *teras* (Cet. 1). Teras.
- Thoha, M. (2017). *Dinamika Ilmu Administrasi Publik*. Prenada Media Group.
- UNDP. (2011). Governance Principles, Institutional Capacity and Quality. In *Towards Human Resilience: Sustaining MDG Progress in an Age of Economic Uncertainty*. [http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Poverty Reduction/Inclusive development/Towards Human Resilience/Towards_SustainingMDGProgress_Ch8.pdf](http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Poverty_Reduction/Inclusive_development/Towards_Human_Resilience/Towards_SustainingMDGProgress_Ch8.pdf)
- Warjio. (2021). Good Party Governance: Praktik Partai Politik Di Indonesia Dan Malaysia Dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. In *Gerhana Publishing*. Gerhana Publishing.
- Young, S., Pongquan, S., & Ear, S. (2011). Local good governance of rural infrastructure development planning: Case studies of Commune Councils in Cambodia. *International Journal of Environmental and Rural Development*, 2(1), 59–64.